

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo Direktorat Sekolah Menengah Atas
(https://sma.kemdikbud.go.id/material_web/logo/logo_SMA.png)

Direktorat SMA adalah instansi pemerintah yang hanya fokus melaksanakan pengurusan pendidikan SMA di tingkat nasional. Pada awal era reformasi instansi ini terbentuk secara mandiri, dalam masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid. Reorganisasi internal dilakukan pada saat itu, seiring dengan perubahan nama departemen dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Tepatnya pada tahun 1999. Yahya Muhaimin adalah pejabat pada saat itu yang dinobatkan sebagai Menteri Pendidikan Nasional.

Dalam reorganisasi ini Dikmenum memiliki tugas untuk mengelola pendidikan SMA. Dulu, Dikmenum hanya fokus mengelola SMP. Semestinya Direktorat Pendidikan Lanjut Pertama mengelola pendidikan SMP.

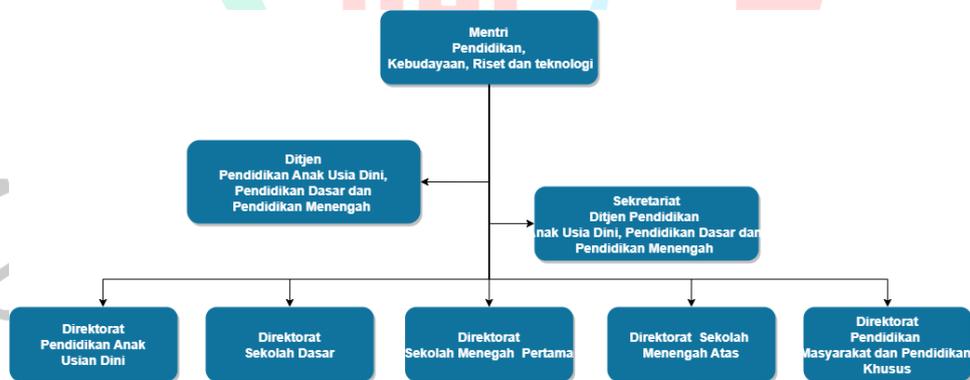
Departemen Pendidikan Nasional berganti nama menjadi Kementrian Pendidikan Nasional pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Dikmenum berubah menjadi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2005. Sebelum menjadi Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah pada tahun 2010 adalah Ditjen Pendidikan Menengah. Pembinaan SMA terletak di bawah Ditjen Pendidikan Menengah.

Kementerian Pendidikan Nasional direorganisasi kembali pada tahun 2015 menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat

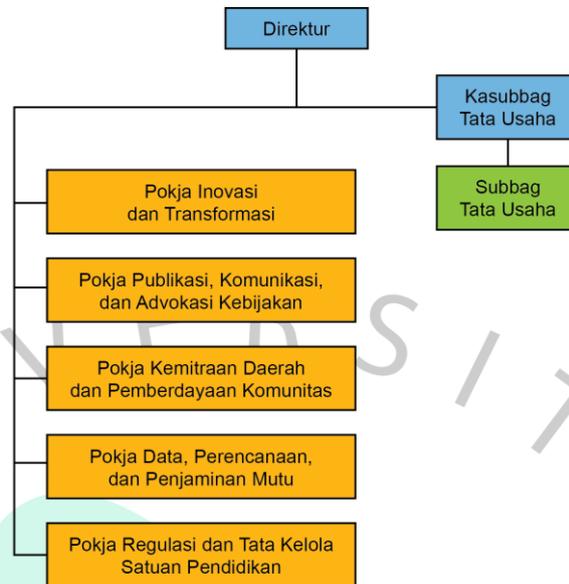
itui Direktorat Pendidikan Dasar dan Direktorat Pendidikan Menengah telah berubah kembali menjadi Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan SMA kembali dekat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tahun 2019 terjadi perubahan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan SMA serta perubahan nama organisasi menjadi Direktorat SMA.

2.2 Struktur Organisasi

Untuk menjalankan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat SMA sesuai dengan struktur dan organisasi memiliki tugas serta fungsi untuk memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan. Direktur dan kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag) dibantu oleh 5 Koordinator Kelompok Kerja (Kapokja). Inovasi dan Transformasi, Publikasi, Komunikasi, dan Advokasi Kebijakan, Kemitraan Daerah dan Pemberdayaan Komunitas, Data, Perencanaan, dan Penjamin Mutu, dan Regulasi, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan adalah beberapa kelompok kerja yang disebutkan di atas.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kemdikbudristek



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi di Direktorat SMA



Gambar 2. 4 Struktur Pokja Inovasi dan Transformasi

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Praktikan melaksanakan Kerja Profesi pada Subpokja Transformasi Digital, yang merupakan bagian dari Pokja Inovasi dan Transformasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat SMA membagi menjadi 5 Pokja dan 1 Subpokja Tata Usaha yang memiliki tugas dan kegiatan rutin sebagai berikut :

1. Pokja Inovasi dan Transformasi
 - Menganalisis dan memahami substansi transformasi SMA, Kurikulum dan Asesmen (IKM), dan Platform Merdeka Mengajar (PMM).

- Menganalisis dan memahami permasalahan dalam transformasi SMA, IKM dan PMM pada tiap Pemerintah Daerah dan Sekolah.
- Menganalisis dan mengidentifikasi praktik baik dalam transformasi SMA, IKM dan PMM pada tiap Pemerintah Daerah dan Sekolah.
- Menyusun materi advokasi transformasi SMA, IKM dan PMM ke Pemerintah Daerah dan Sekolah.
- Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait transformasi SMA, IKM dan PMM secara intensif dan berkelanjutan.

2. Pokja Publikasi, Komunikasi, dan Advokasi Kebijakan

- Menganalisis materi publikasi dalam advokasi kebijakan program prioritas Merdeka Belajar.
- Melakukan publikasi dalam advokasi kebijakan program prioritas Merdeka Belajar.
- Melakukan evaluasi efektivitas publikasi kebijakan program prioritas Merdeka Belajar.
- Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait publikasi secara intensif dan berkelanjutan.
- Menganalisis dan menyusun strategi komunikasi profesional serta melaksanakan komunikasi profesional dalam advokasi kebijakan program prioritas Merdeka Belajar.
- Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait komunikasi dan advokasi kebijakan secara intensif dan berkelanjutan.

3. Pokja Kemitraan Daerah dan Pemberdayaan Komunitas

- Melakukan identifikasi potensi kerja sama dengan komunitas di daerah dalam mendukung program prioritas Merdeka Belajar.
- Menyusun strategi pelaksanaan kemitraan daerah dan pemberdayaan komunitas dalam mendukung program prioritas Merdeka Belajar.
- Membina hubungan baik dan profesional dalam Pemerintah Daerah dan komunitas dalam mendukung program prioritas Merdeka Belajar.

- Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait kemitraan daerah dan pemberdayaan komunitas secara intensif dan berkelanjutan.
4. Pokja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu
 - Melakukan pengumpulan data program prioritas Merdeka Belajar dan data Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) di seluruh Pemerintah Daerah.
 - Melakukan analisis data program prioritas Merdeka Belajar dan data Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) di seluruh Pemerintah Daerah.
 - Menyediakan informasi pelaksanaan dan hasil evaluasi program prioritas Merdeka Belajar dan data Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) di seluruh Pemerintah Daerah.
 - Melakukan koordinasi dengan unit utama lain di Kemdikbudristek terkait data, perencanaan dan penjaminan mutu dan Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) secara intensif dan berkelanjutan.
 5. Pokja Regulasi dan Tata Kelola Satuan Pendidikan
 - Melakukan analisis implementasi dan identifikasi regulasi dalam hal penilaian, pembelajaran tata kelola sarana dan prasarana SMA untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Merdeka Belajar.
 - Menyusun usulan regulasi dalam hal penilaian, pembelajaran tata kelola sarana dan prasarana SMA untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Merdeka Belajar.
 - Menganalisis substansi tata kelola pendanaan (termasuk *platform* ARKAS, SIPLAH, dan SDS) dan sarana prasarana SMA.
 - Melakukan koordinasi dan advokasi dengan Pemerintah Daerah dalam tata kelola pendanaan (termasuk *platform* ARKAS, SIPLAH, dan SDS) dan sarana prasarana SMA.
 6. Pokja Sub Bagian Tata Usaha
 - Melakukan urusan perencanaan dan keuangan,
 - Melakukan urusan kepegawaian,
 - Melakukan urusan ketatalaksanaan,
 - Melakukan urusan barang milik negara,

- Melakukan urusan persuratan dan kearsipan,
- Melakukan urusan kerumahtanggaan Direktorat.

